

ABSTRAK

Wasiat wajibah ialah sebagian dari harta pusaka yang diperuntukan bagi anak angkat yang ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia. wasiat wajibah sendiri merupakan bentuk trobosan yang sudah lama berkembang dalam hukum kewarisan islam. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep serta pengaturan secara jelas mengenai pemberian wasiat wajibah yang diatur dalam Hukum Waris Islam maupun yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Selain itu juga untuk mengetahui Ratio decidendi dalam pembagian harta waris atas pemberian Wasiat Wajibah terhadap ahli waris saudara kandung dalam perkara Putusan Nomor : 58/ Pdt.G 2012/ PA.Wsp. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wasiat wajibah adalah suatu merupakan salah satu bentuk wasiat yang diperuntukan kepada golongan yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari dari pihak pewaris. Hal ini dikarenakan dikarenakan adanya suatu halangan ataupun memang dalam sistem kewarisan islam tidak mengatur mengenai kedudukannya dalam sistem kewarisan. Akan tetapi dalam pengaturan Kompilasi Hukum Islam bahwa wasiat wajibah diperuntukkan bagi anak angkat beserta orang tuangkatnya. Namun, sebagian ulama berpendapat bahwa wasiat kepada orang tua dan kerabat yang pada dasarnya wajib. Hukumnya masih tetap wajib hingga sekarang, sehingga pemberian *wasiat wajibah* kepada anak dan kerabat yang mendapatkan bagian harta peninggalan dapat dilaksanakan sebagaimana yang terdapat dalam *Al-Qur'an* Surat *Al-Baqarah* ayat 180. Hal ini juga didukung pendapat pendapat Ibnu Hazm, “apabila tidak diadakan wasiat untuk kerabat dekat yang tidak mendapatkan warisan maka hakim harus bertindak sebagai pewaris untuk memberikan sebagian warisan kepada kerabat yang tidak mendapatkan warisan sebagai suatu wasiat wajib untuk mereka. Sebelum kelahiran Kompilasi Hukum Islam adalah mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam pada al-Qur'an dan al-Hadits. Sedangkan dalam pertimbangan dalam perkara Putusan Nomor : 58/ Pdt.G 2012/ PA.Wsp. berpijak pada pasal 209 KHI dimana menganggap kedudukan ahli waris sebagai anak dari pewaris dengan dasar kedekatan pewaris dengan ahli waris. Ratio decidendi yang digunakan majelis hakim dalam menangani kasus ini adalah asas non-retroaktif, yaitu peraturan perundang-undangan tidak boleh berlaku secara surut. Apabila penyelesaian akan permasalahan waris tersebut hanya berpijak pada Kompilasi Hukum semata tanpa mempertimbangkan keberadaan peraturan hukum perdata yang lain, tentu akan menjadi masalah, yaitu terbentuknya ketidakpastian hukum dalam penyelesaiannya, dan tentu akan bertentangan dengan prinsip tujuan hukum itu sendiri, dimana tujuan hukum adalah untuk menciptakan kepastian dan keadilan dalam masyarakat.

Kata Kunci : ahli waris, wasiat wajibat, ratio decidendi

ABSTRACT

Mandatory testament is a portion of the inheritance which is intended for adopted children stipulated in the Compilation of Islamic Law (KHI) Indonesia. The obligatory will itself is a form of compromise that has long been developed in Islamic inheritance law. This research aims to know the concepts and regulations clearly regarding the provision of compulsory testaments that are regulated in Islamic Inheritance Laws as well as those stipulated in Compilation of Islamic Law. in addition, it is also to find out Ratio decendi in the distribution of inheritance on the provision of the Obligatory Testament to the heirs of siblings in case Decision Number: 58 / Pdt.G 2012 / PA.Wsp. The results of the study showed that the compulsory testament is a form of testament intended for groups who did not obtain part of the inheritance from the heir. This is because due to an obstacle or indeed in the Islamic inheritance system does not regulate its position in the inheritance system. However, in the regulation of the Compilation of Islamic Law that the wills are obliged to be adopted for adopted children and their fugitives. However, some scholars argue that testaments to parents and relatives are basically mandatory. The law is still compulsory until now, so that the giving of compulsory testaments to children and relatives who get part of the inheritance can be carried out as contained in Al-Qur'an Surat Al-Baqarah verse 180. This is also supported by the opinion of Ibn Hazm, "if not a will is made for a close relative who does not get an inheritance, so the judge must act as an heir to give part of the inheritance to relatives who do not get an inheritance as a mandatory will for them. Before the the Compilation of Islamic Law is referring to the provisions contained in the al-Qur'an and al-Hadith. While in consideration in the case Decision Number: 58 / Pdt.G 2012 / PA.Wsp. based on article 209 KHI which considers the position of heirs as children of the heirs on the basis of the closeness of the heirs to the heirs. The ratio of decidendi used by the judges in handling this case is the principle of non-retroactivity, that is, laws and regulations must not apply retroactively. If the settlement of the inheritance problem is based only on the Compilation of Law without considering the existence of other civil law regulations, it will certainly be a problem, namely the formation of legal uncertainty in its resolution, and of course it will conflict with the principle of legal objectives themselves, where the purpose of law is to create certainty and justice in society.

Keywords: heirs, wills, ratio decidendi

MOTTO

BERDOA DAN BERUSAHA ADALAH KUNCI DARI KEBERHASILAN

“Doa Tanpa Usaha : Omong Kosong”

“Usaha Tanpa Doa : Sombong”

inna ma'al 'usri yusroo

fa-idzaa faroghta fangsob

wa-ilaa robbika farghob

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.”

-QS. Al-Insyirah: 6-8.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan kuasa-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini walaupun terdapat hambatan kecil yang berasal dari diri maupun keadaan yang terjadi diluar kehendak penulis yang menjadi kenangan dalam penulisan tesis ini. Tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak tentunya studi penulis pada Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan penulisan tesis ini tidak mungkin terselesaikan. Oleh karena itu lewat kesempatan ini, penulis menghaturkan ucapan terimakasih yang tulus dari relung hati yang paling dalam kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Mohammad Nasih, S.E., MT. Ak. CMA. Selaku rektor Universitas Airlangga, yang telah memberikan ilmu, nasihat dan kebijakan sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian ini.
2. Ibu Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang telah memberikan ilmu, nasihat dan kebijakannya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
3. Ibu Dr. Mas Rahmah, S.H., M.H., LL.M. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Airlangga, yang telah memberikan ilmu, nasihat dan saran kepada saya demi kesempurnaan tesis ini.
4. Bapak Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad S.H. M.H. dan Bapak Dr. Prawitra Thalib, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing, yang telah mengorbankan waktu, tenaga, dan kesabaran ditengah kesibukan dan kondisi

kesehatannya, serta memberikan ilmu, nasihat dan saran kepada penulis demi kesempurnaan tesis ini.

5. Bapak Dr. Dian Purnama Anugerah. S.H., M.Kn., L.LM. selaku pembimbing akademik yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran ditengah kesibukannya serta memberikan nasihat, dan arahan selama penyusunan kartu rencana studi maupun masa perkuliahan di Universitas Airlangga.
6. Ibu Dr. Soelistyowati, S.H., MH., Ibu Erni Agustin, S.H., MH., dan Dr. Bambang Sugeng Ariadi Subagyo, S.H., M.H. selaku dosen penguji tesis yang telah memberikan ilmu, nasihat dan saran kepada saya demi kesempurnaan tesis ini.
7. Guru Besar, Bapak dan Ibu Dosen Pengajar pada Magister Kenotariatan Universitas Airlangga yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang telah dengan sabar mendidik dan memberikan ilmu selama saya menempuh pendidikan magister kenotariatan di Universitas Airlangga.
8. Bapak dan Ibu Staf Akademik Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Airlangga yang selama ini telah membantu kelancaran proses perkuliahan dan urusan administrasi saya di Universitas Airlangga.
9. Yang tercinta dan tersayang kedua orang tua saya, yang telah memberikan dukungan baik mori lmaupun materiil yang selalu menyemangati dan mendukung tanpa lelah serta restu yang senantiasa menyertai dalam setiap doa sehingga saya mampu menyelesaikan tesis dan pendidikan magister ini.

10. Teruntuk teman rasa saudara yang selalu mendukung dan menemani mulai awal saya menjadi mahasiswa baru sampai lulus dan sekaligus teman satu konsulat yang selalu membangkitkan saat kemalasan menyelimuti dan yang membangkitkan disaat saya tumbang, sampai akhirnya saya dapat menyelesaikan tesis.
11. Seluruh teman seangkatan yang tidak bisa disebutkan satu persatu, Santy Ainun dan Qistyna Armalia yang menjadi ketua kelas dan sabar mengarahkan saya saat menempuh perjalanan perkuliahan dan Shohibul Khoir, Shandy Aldo dan Adam setyawan,yazid shidqi faisal yang membantu saya untuk menyelesaikan jurnal-jurnal, dan kepada seluruh teman-teman seangkatan terimakasih atas doa dan dukungan kalian, tanpa kalian semuanya masa perkuliahan di Surabaya tidak akan berwarna, suka dan duka selalu kita jalani bersama, dan tetap berjuang bersama agar dapat melewati tahapan-tahapan sehingga menjadi notaris kelak.

Kesempurnaan itu hanya milik Tuhan Yang Maha Esa maka penulis amat sadar bahwa tesis ini jauh dari kata sempurna oleh karena itu penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun. Penulis berharap tesis ini dapat berguna dan memberikan manfaat bagi pembacanya.

Surabaya, 16 Januari 2020

Penulis,

ANDRE MEIRYANDY SUGESTY

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie (Staatsblad 1847 Nomor 23).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.